

Membumikan Nilai dan Etika Politik Kristen dalam Teologi Titus 3:1-7 Bagi Politikus Kristen Masa Kini

¹Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi, ²Yonatan Alex Arifianto, ³Nining Indriana
¹Sekolah Tinggi Teologi KADESI, Yogyakarta, ²Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala,
Salatiga, ³Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup
ngesthi1976@gmail.com

Abstract: *Many people of God feel reluctant or unwilling to discuss political ethics. Moreover, when Christians talk about politics, they will unilaterally stay away from it. Because there is an assumption that Christianity should not be mixed with politics. Through this research, Christian politicians who are involved in politics can ground the values and ethics of Christian politics in the theology of Titus 3:1-7 for today's Christian politicians as a basis for building healthy political theological ethics. Using a descriptive qualitative method with a literature study approach, it can be concluded that grounding Christian political values and ethics in the theology of Titus 3:1-7 for today's Christian politicians requires an understanding and paradigm that Christian politicians can know the nature of politics and its interests. They can even understand the church and political challenges. So that politicians who live with integrity have attitudes and principles that are in accordance with Christian political values and ethics. Of course, Christian politicians must submit to the government and the law, which is to bring obedience in doing good deeds, not slander, not quarrel and be able to live in obedience. Not going astray, not being a slave to lust, not living in wickedness, not living in malice and hatred and certainly being able to appreciate grace.*

Keywords: *Grounded values; political ethics; christian politics; politicians; elections.*

Abstrak: Banyak umat Tuhan yang merasa sungkan atau tidak mau untuk membahas etika politik. Apalagi adanya orang Kristen bila berbicara tentang politik maka secara sepihak akan menjauhi hal tersebut. Karena adanya anggapan bahwa kekristenan tidak boleh dicampurkan dengan politik. Melalui penelitian ini maka politikus Kristen yang terjun dalam percaturan politik dapat membumikan nilai dan etika politik Kristen dalam teologi Titus 3:1-7 bagi politikus Kristen masa kini sebagai dasar dalam membangun etika teologis politik yang sehat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur maka dapat disimpulkan membumikan nilai dan etika politik Kristen dalam teologi Titus 3:1-7 bagi politikus Kristen masa kini, diperlukan pengertian dan paradigma bahwa politikus Kristen dapat mengetahui hakikat politik dan kepentingannya. Bahkan mereka dapat memahami gereja dan tantangan politik. Supaya politikus yang hidup berintegritas memiliki sikap dan prinsip yang sesuai dengan nilai dan etika politik Kristen. Tentunya politikus Kristen harus tunduk kepada pemerintah dan hukum, yang memang untuk membawa ketaatan dalam melakukan perbuatan baik, tidak memfitnah, tidak bertengkar dan dapat hidup

dalam Ketaatan. Tidak Sesat, tidak menjadi budak hawa nafsu, tidak hidup dalam kejahatan, tidak hidup dalam kedengkian dan keji serta kebencian dan tentunya dapat menghargai kasih karunia.

Kata kunci: Membumikan nilai, etika politik, politik kristen, politikus, pemilu.

I. Pendahuluan

Dalam iman percaya kepada Tuhan, sejatinya orang Kristen percaya kepada pekerjaan Allah di dalam lingkup pemerintahan dan segala hal yang menyangkut hajat orang banyak, sebab pemerintahan dibentuk oleh Allah, namun orang percaya terkadang memiliki konsep dan paradigma yang salah tentang dunia pemerintahan yang dipilih lewat jalur perpolitikan seperti yang dinyatakan dalam penelitian R Siti Zuhro mengungkapkan bahwa perpolitikan belum maksimal menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik.¹ Anggapannya bahwa politik itu jahat dan paradigma yang salah membuka mindset bahwa politik bukan bagian dari mereka. Sebab setiap kali mendekati pemilu atau menghadapi isu-isu politik tertentu, orang Kristen sering kali memperdebatkan sikap yang seharusnya diambil oleh gereja. Banyak yang memilih untuk menjauh dari politik atau setidaknya bersikap netral.² Bahkan ada perspektif yang mendasari menjauhi politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dilakukan karena ada hasil dari politik menghasilkan pemimpin kotor,³ terlebih orang percaya yang bersikap anti politik berarti menganggap bahwa pengajaran Yesus pada masa lampau tidak dapat diaplikasikan bagi persoalan politik masa kini.⁴ Dan akhirnya hal itu bertolakbelakang dengan nilai spritualitas yang dikerjakan dengan nilai kasih. Terlebih pemikiran dan anggapan salah juga mewarnai bahwa kekristenan tidak boleh dicampur adukan dengan politik. Bahkan orang Kristen sering mengalami kebingungan dalam meresponi dinamika politik yang terjadi.⁵ Dari data diatas diartikan bahwa memang tidak sedikit yang mengerti secara masif bahwa kekristenan berkewajiban untuk masuk kedalam dan berkecimpung di dunia perpolitikan, hal itu bertujuan demi memenangkan pengaruh kekristenan atas suatu daerah, bahkan negara. Statement politik itu kotor juga didengungkan supaya mereka yang hanya duduk didalam kekuasaan, yang mana mereka menyebarkan hoax dan informasi sesat terkait nilai politik. Oleh karena itu artikel ini membahas akan informasi dan nilai etika politik yang harus diketahui oleh orang Kristen sebagai dasar mengaktualisasikan diri dalam percaturan politik. Maka penulis menarasikan secara deskriptif pandangan Alkitab

¹ R Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik*, 2019, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.

² Markus Domingus Lere Dawa, "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik," *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 54–78, <https://doi.org/10.47596/solagratia.v3i2.40>.

³ Ferdinan Samuel Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.52157/me.v6i1.66>.

⁴ Kurnia Sondang Lumban Gaol, "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia," *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 35–51, <https://doi.org/10.52157/me.v5i1.57>.

⁵ Gilrandi Aristya Dwi pramonojai, "Politik Popularitas Menurut Etika Kristen," *Ritornera - Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia*, 2023, <https://doi.org/10.54403/rjtpi.v3i2.68>.

tentunya politik Kristen dalam hal ini politik. Sehingga dengan narasi dari nilai dan etika Alkitab dapat memberikan pencerahan dan juga dapat mengaja bahwa kekristenan harus menerapkan dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan sebagai warga negara yang baik disaat berada dalam dunia perpolitikan. Sehingga sejatinya orang kristen dapat bergerak maju untuk membangun negeri sesuai apa yang dinyatakan dalam Alkitab untuk menjadi garam dan terang di tengah pergolakan politik yang sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan.

Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, saat bangsa Israel ingin memiliki raja dan tidak mau dipimpin secara teokrasi maka Tuhan mengirim Samuel untuk menyatakan bahwa Tuhan yang memilih Saul menjadi raja. Sebab Tuhan bekerja dan melakukan pekerjaannya melalui segala macam *market place* perpolitikan dan tentunya Tuhan memilih dan mengurapi serta Tuhan sendiri menempatkan orang-orang pilihan-Nya di segala *market place* untuk memuliakan nama Tuhan. Dari pergolakan bangsa Israel dan pilihan Tuhan atas Saul, maka sejatinya tidak perlu kekristenan untuk menolak atau tidak respek terhadap dunia politik. Maka dengan mempelajari perpolitikan dari bingkai alkitabiah mengenai dunia politik, sejatinya kekristenan dimampukan karena dapat menjadi dasar untuk mengetahui dan memahami ukuran-ukuran, norma bahkan nilai-nilai untuk menilai dan memahami suatu keadaan perpolitikan yang sedang terjadi saat ini, bahkan untuk mengukur seberapa berdampak orang Kristen dalam membangun negeri dalam keterlibatan anak Tuhan di organisasi maupun dalam *market place*, atau dapat menjadi jawaban sebagai usaha untuk mencari tahu rencana dan kehendak Tuhan atas suatu situasi politik yang sedang terjadi era ini, maka mengambil bagian untuk terjun memberikan dampak baik bagi masyarakat dan sesama. Sebab Tuhan yang memiliki inisiatif dan kehendak dalam segala pemerintahan dan tentunya Tuhan juga bergerak dan berkehendak merancang kebaikan bagi setiap bangsa, maka bagaimana mungkin orang percaya tidak masuk dalam memengaruhi nilai Kristen dan ajaran Kasih dalam membangun bangsa, dan bagaimana mungkin kekristenan harus berpaling muka atau acuh tak acuh, egosi dan tidak peduli dengan kondisi politik, bahkan kekristenan membuang kesempatan dan mengesampingkan kerinduan Tuhan supaya kekristena dapat menjadi garam dan terang.

Memang tidak dapat dipungkiri perpolitikan di Indonesia yang dikerjakan oleh anak Tuhan sering mengganggu rasa bangga akan integritas dalam kekristenan, sebab banyak sekali orang Kristen yang harus berurusan dengan undang-undang dan masuk dalam ikatan jahat serta masuk dalam persengkongkolan jahat tindak pidana korupsi, banyak sekali orang Kristen harus merasakan jeruji besi akibat melanggar hukum ketika menjabat sebagai pejabat dalam dunia politik pemerintahan ini. Dimana sejatinya umat Kristiani merupakan bagian dari Negara dan kekristenan berada dalam lingkaran ketaatan kepada negara, di mana suatu Negara yang harus mempunyai sistem politik. Banyak umat Kristiani yang merasa enggan ketika politik dibicarakan, apalagi diminta untuk berpartisipasi di dalamnya. Barangkali faktor penyebab sikap demikian adalah kurangnya pemahaman atau paradigma

yang salah terhadap politik, dan kurangnya pemahaman akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat beriman dan sebagai warga negara.⁶

Berpijak dari latar belakang penelitian yang telah dideskripsikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membumikan nilai dan etika politik Kristen dalam teologi Titus 3:1-7 bagi politikus Kristen masa kini. Hal ini dilakukan demi memberi sumbangsih bagi tanggung jawab dan sikap umat Kristen memiliki kualifikasi nilai dan etika politik sesuai dengan kitab Titus 3:1-7. Sebab dalam Titus tersebut ada kualifikasi bagi kepemimpinan Kristen yang dapat menjadi acuan pemimpin masa kini. Maka penelitian ini juga menuntut sikap dan tanggung jawab gereja dalam membumikan segala nilai dan norma kebenaran bagi masyarakat gereja.

Berkaitan dengan topik dengan tema membumikan nilai dan etika politik Kristen dalam teologi titus 3:1-7 bagi politikus Kristen masa kini pernah diteliti oleh Henny Debora Sianipar, Pratiwi Eunike, dengan tema Perspektif Etika Politik Kristen Tentang Hubungan Gereja Dan Negara. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah beragama tidak boleh “acuh” atau “apatis atau sebagai hal masabodoh” tetapi kekristenan harus berperan aktif dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan negara, seperti kegiatan kenegaraan: pesta demokrasi, bahwa setiap pemeluk agama harus ikut serta dengan cara memberikan suara untuk memilih pemimpin bangsa yang memiliki kualitas, kapabilitas serta berintegritas dan bertakwa atau takut akan Tuhan.⁷ Begitu juga dengan Yonatan Alex Arifianto dan Aji Suseno melakukan penelitian serupa dalam artikel filsafat politik dan praktiknya dalam perspektif iman Kristen dengan kesimpulan bahwa sikap iman Kristen untuk terus menjadi teladan, garam dan terang dunia bagi masyarakat di sekitar organisasi atau market place politik dan tentunya menjadi juga harus memiliki tanggung jawab umat beriman demi negara untuk kemajuan negara dan sesama manusia.⁸ Berdasarkan kedua penelitian tersebut dan fenomena paradigma yang salah terhadap etika politik Kristen maka masih ada hal-hal yang belum diteliti yaitu tentang nilai dan etika politik Kristen dalam teologi titus 3:1-7 dimana menjadi pertanyaannya bagaimana hal itu sebagai cara dalam membumikan nilai dan etika politik Kristen dalam teologi titus 3:1-7 bagi politikus Kristen masa kini. Oleh sebab itu penelitian dalam kajian artikel ini akan meneliti dan membahas terkait tentang topik-topik tersebut.

⁶ James James, “Partisipasi Orang Kristen Dalam Perpolitikan Di Indonesia,” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 2, no. 2 (2016): 187–98, <https://doi.org/10.24114/antro.v2i2.5305>.

⁷ H D Sianipar and P Eunike, “Perspektif Etika Politik Kristen Tentang Hubungan Gereja Dan Negara,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 1, no. 1 (2020): 33–46, <https://jurnal.widyaagape.ac.id/index.php/jrsc/article/view/38>.

⁸ Yonatan Alex Arifianto and Aji Suseno, “Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen,” *Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 2 (2020): 2087–7927, <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias>.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,⁹ dengan pendekatan studi pustaka. Maka penulis dengan melihat peran kajian ini maka menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literature yang terhubung dalam penelitian terkait teologi dan pastoral.¹⁰ Dari temuan data terkait nilai dan etika politik Kristen dalam teologi Titus 3:1-7 maka penulis menganalisis dengan pendekatan hermeneutik. Dan ditemukan kata dan makna yang berbeda sehingga muncul sebagai bahan analisis teks beserta makna dan konteksnya. Setelah rumusan atau konsep filsafat politik dan pengamalannya ditemukan dalam kerangka iman Kristen, maka dikembangkan penerapannya hingga saat ini. Dengan menggunakan Alkitab sebagai sumber utama dan juga memasukkan literatur terkini serta penulis juga menggunakan berbagai artikel jurnal untuk menambahkan penelitian literatur ini ke jalur kajian kritis. Dengan demikian, dalam perspektif iman Kristen, hasil kajian tersebut dapat menjadi refleksi dan investigasi untuk menentukan sikap dan aktualisasi politik dan kebijakan tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

Hakikat Politik dan Kepentingannya

Kehidupan bernegara dari zaman perjanjian lama hingga dewasa ini tidak lepas dari trik dan intrik perpolitikan, bagaimana peran raja setelah Salomo, negara harus terpecah menjadi dua dan perebutan kekuasaan dari anak-anak raja menjadi persoalan dalam negara tersebut. Tentunya dibangsa ini politik menjadi kendaraan untuk membangun personal branding kepemimpinan bangsa maupun gereja yang bersifat kerohanian. Politik merupakan suatu langkah strategis untuk memperoleh kekuasaan dan merupakan kegiatan kepemimpinan untuk mendorong masyarakat mempunyai kekuasaan atau menjalankan kekuasaan. Dorongan-dorongan dan motivasi tersebut disebabkan oleh adanya peluang yang diberikan oleh kekuasaan, seperti kepemimpinan, organisasi, pengambilan keputusan (politik) oleh pemerintah.¹¹ Pada dasarnya makna dan tindakan politik itu memiliki arti yang sangat baik yaitu berkemampuan pribadi dalam mengelolah negara dengan sebuah sistem yang menempatkan manusia sebagai bagian untuk dihargai dan dijadikan tujuan memanusiakan yang mana bertujuan untuk mencapai kehidupan yang penuh damai sejahtera bagi setiap warga negara.¹² Politik juga merupakan bagian dari cara-cara perebutan kekuasaan. Di mana ada keinginan yang kuat untuk mencapai suatu posisi kekuasaan, dan untuk memimpin. Dan tentunya kekuasaan bukanlah sesuatu yang buruk atau digunakan

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 89.

¹⁰ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

¹¹ Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis," *Didaskein* 6, no. 2 (2016): 1–11.

¹² Erman S. Saragih.

hanya dengan maksud dan tujuan kebaikan bagi orang lain. Dan kekuasaan tidak ditujukan untuk kepentingan egois, melainkan sebagai sarana untuk menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua.¹³

Namun dewasa ini, ada umat Kristiani yang dibingungkan karena hal-hal yang tidak Alkitabiah dengan berbagai persoalan terkait intimidasi dari ajaran mendasar bahwa politik tidak boleh diperjuangkan. Bahkan peran politik yang seharusnya mereka mainkan dalam konteks pemilu, baik legislatif maupun presiden, adalah urusannya Tuhan. Haruskah umat Kristiani menyerah dan menyerahkan “nasib” kepada orang lain, atau haruskah mereka berperan aktif dalam peran tersebut.¹⁴ Jelaslah bahwa politik ada agar manusia sebagai ciptaannya dapat menikmati nikmat, berkat dan kebaikan, cinta dan kasih karunia Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bebas namun memiliki aturan yang tidak menjadi batu sandungan orang lain.¹⁵ Untuk itu paradigma dan definisi yang salah terhadap pemahaman akan politik harus dikesampingkan. Maka kepentingan politik Kristen yang bertujuan dan mengkaitkan akan keterlibatan para pemimpin Kristen dalam politik yang diharapkan membuat kebijakan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus sebagai teladan dan bekerja demi kesejahteraan sesamanya dan demi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁶ Bagi politik Kristen bukanlah politik kekuasaan atau kepentingan pribadi, melainkan politik pelayanan dan perjuangan demi kebaikan bersama demi kepentingan semua orang dan seluruh ciptaan Tuhan.¹⁷ Selaras dengan statment tersebut Paulinus Yan Olla menyatakan dengan gamblang bahwa politik merupakan cara atau jalan dalam kesucian.

Kesadaran akan politik sebagai jalan yang disertai perbuatan kesucian didasari pada keyakinan dan iman yang teguh akan Tuhan ada dalam pemilihan untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga seharusnya semua anggota gereja (pengikut Kristus) dipanggil dan harapkan untuk masuk mengikut Yesus untuk mewujudkan nilai kekekalan tentang keselamatan dan juga nilai peradaban manusia.¹⁸ Namun ketika di dunia ini umat Kristiani berkuasa di berbagai posisi yang sangat penting, hal tersebut tidak hanya untuk mengedepankan kepentingan umat Kristiani atau kepentingan Gereja saja, namun agar orang-orang yang benar dan berkelakuan baik, profesional dan berintegritas, dari berbagai latar belakang agama, baik Kristiani maupun non-Kristen. Secara bergandengan tangan

¹³ Jhon Retei Alfri Sandi, “Perilaku Politik Gereja Kristen Evangelis (GKE) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kalimantan Tengah Tahun 2019,” *Jurnal Politik Profetik* 8, no. 1 (2020): 37–61.

¹⁴ Hadi P. Sahardjo, “Orang Kristen Dan Kehidupan Politik,” *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 3, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/10.51828/td.v3i2.96>.

¹⁵ Rudy N. Assa, *Tokoh-Tokoh Kristen Yang Mewarnai Dunia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), 297.

¹⁶ Nur Budi Santosa, “Penokohan Daniel Sebagai Figur Politisi Kristen Di Indonesia,” *Jurnal Antusias* 3, no. 6 (2014): 73–81.

¹⁷ Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia,” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–22, <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.

¹⁸ Paulinus Yan Olla, *Spiritualitas Politik: Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 68.

untuk membangun bersama secara keseluruhan dan melayani untuk kepentingan seluruh komunitas, tanpa diskriminasi rasial. Oleh karena itu, politik Kristen bukanlah politik kekuasaan dan kepentingan golongan atau pribadi, melainkan politik pelayanan dan keadilan bagi seluruh warga negara.¹⁹ Yang bertujuan untuk membangun manusia dan sumber daya manusia menjadi lebih bermartabat dan mementingkan rasa menghargai dan memiliki kualitas dan kualifikasi yang mumpuni dalam melayani.

Gereja dan Tantangan Politik

Sikap dan peran gereja tentunya menjadi solusi dalam menghadapi kekristenan dan perpolitikan yang memang tidak baik-baik saja. Gereja terhadap politik dan segala hal terkait peran gereja dalam pembangunan negara menjadi topik yang terus menimbulkan perdebatan di masyarakat. Kapan pun pemilu semakin dekat atau isu-isu tertentu muncul dalam politik negara, umat Kristiani dengan penuh semangat mendiskusikan sikap yang harus diambil gereja. Sikap yang banyak diambil adalah menjauhkan diri dari politik atau setidaknya bersikap netral.²⁰ Hal inilah yang terus memperburuk keadaan dimana suara dan keinginan gereja untuk diperhatikan menjadi pupus sebab pembuat undang-undang dan kebijakan tidak ada yang memprioritaskan kekristenan. Untuk itu paradigma ini membuat peran orang Kristen dalam politik dan kepemimpinan di bangsa ini tidak nampak dan berdampak, hal ini dikarenakan ada anggapan dari beberapa orang Kristen yang menganggap bahwa politik itu kotor; sehingga menjauhkan diri dari dunia politik.²¹ Memang masih kuatnya "syndrome" atau "fobia" politik yang berangkat dari pemahaman dan afektif yang buta terhadap pernyataan-pernyataan bahwa gereja sama sekali tidak boleh bersinggungan dengan politik, maka akan berdampak pada gereja yang acuh tak acuh.²²

Memang penulis setuju bahwa gereja tidak boleh mengidentifikasi atau bertindak sebagai partai politik. Gereja adalah institusi yang melampaui semua partai politik.²³ Namun untuk masuk memajukan kekristenan juga dibutuhkan panggung dan kendaraan sehingga ada kemungkinan suara masyarakat yang termarginalkan akan mendapat prioritas untuk diselesaikan lewat kekuasaan yang dicapai dari kendaraan politik. Tentu saja, sejauh politik mengalir dari kasih dan bimbingan Tuhan, maka itu adalah sebuah berkah di dunia ini. Politik yang bersumber dari kebenaran Firman Tuhan dan nilai-nilai serta ajaran Alkitab, jika dilakukan secara benar dan baik, maka kekristenan akan berdampak dan menjadi terang

¹⁹ Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia."

²⁰ Dawa, "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik."

²¹ Aripin Tambunan, "Peran Orang Kristen Dalam Politik Dan Kepemimpinan Negara," *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 3, no. 2 (2014): 165–81.

²² Saut Hamonangan Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 3.

²³ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa* (Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009), 224–25.

dan garam di dunia yang penuh tipu daya.²⁴ Oleh karena itu, agama Kristen harus menegaskan bahwa politik ada hanya untuk mengabdikan dan berdedikasi hanya kepada Tuhan dan sesama manusia. Oleh sebab itu politik yang mengarah pada hal negatif harus digantikan dengan politik yang bersifat positif dalam arti politik pembebasan dari segala penindasan dan segala kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁵ Semua bagi nilai kemanusiaan dan tentunya memuliakan Tuhan.

Analisa Titus 3:1-7

Politikus yang hidup berintegritas

Rasul Paulus mengarahkan Titus untuk menjelaskan tugas-tugas khusus yang harus ia penuhi secara pribadi dan dalam komunitas untuk kebaikan orang lain. Paulus meminta Titus supaya dapat menasihati orang percaya agar dapat mengamati hal-hal yang lebih umum tentang ketaatan dan ketundukan kepada mereka yang berwenang, kesediaan untuk berbuat baik, dan bersikap lembut dan baik hati kepada semua orang. Ini semua adalah hal-hal yang baik dan baik dalam doktrin atau agama. Itu sebabnya Titus harus mengingatkannya akan semua hal ini. Adalah tugas para hamba Tuhan untuk mengingatkan gereja akan tugas-tugasnya. Sama seperti mereka mengingatkan orang-orang tentang Tuhan melalui doa (Yes 62:6), mereka juga harus mengingatkan mereka tentang Tuhan melalui khotbah mereka: Saya ingin terus mengingatkan Anda akan hal ini (2 Pet 1:12). Mengabaikan komitmen adalah kelemahan umum, sebab integritas harus menjadi bagian dari para politikus tersebut dimana politikus kristen tentunya menghargai dan memiliki komitmen serta loyalitas yang kuat untuk mengaktualisasikan diri dalam ajang politik, maka perlu pemimpin gereja memberikan pemahaman dan juga menjadi teladan dalam politik.²⁶ Sehingga para politikus Kristen perlu diingatkan dan didorong untuk menjaga komitmennya. Ini adalah tugas dan alasan dari tugas tersebut. Oleh karena itu, politisi wajib menghayati nilai-nilai dan etika politik Kristen dalam teologi Titus 3:1-7, di mana makna kata tersebut dianalisis untuk mendapatkan kualifikasi yang harus dilakukan seseorang sebagai politisi jika memiliki Kepemimpinan dan kekuasaan dalam membangun negara dan berdampak pada orang lain.²⁷

Tunduk kepada pemerintah dan hukum

Kata Tunduk menggunakan kata *hupotasso* dimana kata ini memiliki arti menaklukkan diri, merendahkan diri dalam rela untuk berbuat sesuatu, Menaklukkan, menundukkan; pasif mematuhi, takluk, menaati, menerima perintah dari mengambil tempat rendah. Orang percaya harus yang mentaati pada hukum dan pemerintahandan

²⁴ Santosa, "Penokohan Daniel Sebagai Figur Politisi Kristen Di Indonesia."

²⁵ Robert .P. Borong, *Etika Politik Kristen* (Jakarta: UPI& PSE, 2006), 6.

²⁶ Yonatan Alex Arifianto and Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi, "Aktualisasi Pemimpin Gereja Menjaga Moral Dan Integritas Umat Dalam Menghadapi Tahun Politik," *Jurnal Salvation* 4, no. 1 (2023): 60–71.

²⁷ (Henry Matthew Commentary 2002.)

orang-orang yang berkuasa yang mana pemerintahan juga dijadikan oleh Tuhan. Ketundukan kepada aturan dan juga pribadi yang telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebab pemerintah adalah perpanjangan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pengajaran Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen seharusnya memiliki sikap yang benar terhadap pemerintah sebagai hamba Allah yang diangkat oleh-Nya. Namun, ada batasan dalam ketaatan ketika pemerintah bertentangan dengan kehendak dan tujuan Allah. Dalam hal ini, kekristenan mengharuskan penolakan terhadap semua aturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai alkitabiah.²⁸

Kekristenan diingatkan untuk tunduk pada pemerintah dan figur otoritas. Sudah semestinya orang Kristen pun yang adalah warga negara harus bersikap taat kepada pemerintah yang terwujud di dalam mentaati setiap peraturan yang diberlakukan.²⁹ Pemerintahan didirikan oleh Tuhan untuk kebaikan bagi semua, dan karena itu mereka harus dihormati diberi tempat untuk dihargai serta dipatuhi oleh semua, bukan dengan ancaman atau paksaan, tetapi secara sukarela dan menurut hati nurani mereka. Pemerintah, penguasa, dan hakim, yaitu, semua otoritas sipil atau pemerintah, baik tertinggi, tertinggi, atau bawahan, dalam pemerintahan di mana mereka tinggal, apapun jenisnya, harus, dalam hal-hal yang sah dan jujur dan berkaitan dengan jabatan para penguasa itu menuntut, dipatuhi dan dipatuhi. Kekristenan disalahartikan oleh lawan-lawannya sebagai agama yang merugikan hak-hak penguasa dan pemerintah, rentan terhadap perpecahan dan perlawanan, dan berusaha memberontak melawan otoritas yang sah. Untuk membungkam pandangan picik orang bodoh dan kata-kata jahat musuh, orang Kristen diingatkan tentang ketaatan dan ketundukan yang patut dicontoh kepada pemerintah yang mengatur mereka. Keinginan alami untuk kebebasan harus dibimbing dan dibatasi oleh akal dan Kitab Suci. Hak istimewa spiritual tidak menghapus atau melemahkan tugas mereka sebagai warga negara, tetapi menegaskan dan memperkuat mereka: "Ingatkan mereka, kemudian, untuk tunduk pada penguasa."³⁰

Ketaatan dalam melakukan perbuatan baik

Makna dari kata taat yang berasal dari bahasa Grika dari kata *peiyarcew peitharcheo* adalah menaati, menuruti, mendengarkan. Politisi yang memiliki integritas juga dituntut untuk taat dan melakukan kebaikan dimana ketaatan dan bersedia mengerjakan apa yang dipercaya dengan baik. Beberapa orang menafsirkan ini sebagai pekerjaan baik apa pun yang dituntut dari mereka yang berkuasa dan tentunya mereka dianggap sebagai pribadi yang memiliki moral dan integritas yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka: "Apa pun yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban, untuk memajukan dan

²⁸ Kasieli Zebua and Mario Gani, "Ketaatan Kepada Pemerintah Dalam Perspektif Perjanjian Baru," *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 2023, <https://doi.org/10.56191/shalom.v3i1.71>.

²⁹ Ray Regynaldi, "Studi Etis Terhadap Ketidaktaatan Sipil Dari Perspektif Tema 'Ketaatan' Dalam Perjanjian Baru," *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 2012.

³⁰ Henry's Matthew, "Matthew Henry Commentary On Whole Bible," 2002, <https://www.biblestudytools.com/commentaries/matthew-henry-complete/1-peter/2.html>.

mengamankan ketenteraman dan ketenangan masyarakat, jangan ragu untuk memajukannya, tetapi selalu siap untuk melakukannya." Oleh sebab itu iman yang sejati adalah iman yang nyata di dalam perbuatan yang baik. Perintah memang juga menyatakan masyarakatnya dalam mencakup segala macam perbuatan baik, di setiap kesempatan, baik itu untuk Tuhan, untuk diri sendiri, atau untuk sesama. Apapun yang membawa kemuliaan bagi agama di dunia ini. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, terpuji, hendaknya direnungkan (Fil 4:8) agar kamu bisa mengikutinya dan memperdalamnya. Perbuatan baik dan sikap yang tidak berbahaya, kata-kata yang baik, maupun niat baik tidak cukup tanpa perbuatan baik.³¹

Tidak memfitnah

Kata memfitnah dalam bahasa Aslinya adalah menggunakan kata blasfhemew blasphemo dimana makna tersebut berarti menghujat, mencaci maki atau lebih kepada memfitnah dengan melalui iman, atau bertujuan untuk menyangkal imannya atau bisa bekerja sama dengan Iblis. Hindarilah memfitnah orang lain tanpa alasan yang jelas, menggunakan kata-kata yang tidak adil, bohong, atau tidak perlu, yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain tanpa membawa manfaat. Jika tidak ada yang baik untuk diucapkan, lebih baik diam daripada menyebarkan fitnah tanpa pemikiran yang matang. Kekristenan seharusnya disampaikan dengan lemah lembut dan hormat, serta dengan hati nurani yang bersih, agar mereka yang memfitnahmu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus merasa malu atas fitnah tersebut.³² Maka itu para politisi tidak boleh terobsesi dengan memfitnah orang lain atau membuat sesuatu yang buruk dari apapun, tetapi harus melakukan kebaikan sebanyak yang kita bisa. Perebutan kursi kekuasaan jangan dikotori dengan black campaign atau hoax yang disebarkan demi menjatuhkan lawan. Politisi Kristen tidak boleh bergosip dan menyebarkan cerita keji yang mendiskreditkan lawan atau teman dan menghancurkan cinta persaudaraan. Menceritakan cerita buruk tentang orang lain agar terlihat buruk, atau bertindak munafik, terlibat dalam hal-hal di luar jangkauan atau tanggung jawab, semuanya itu dilarang.³³

Tidak bertengkar

Kata Bertengkar mengunkan kata amacov amachos yang berarti tidak mau berdamai atau memiliki pemikiran untuk melawan sehingga tidak ada perdamaian. Dari makna tersebut seharusnya politisi sejatinya menjauhi sikap dan keinginan untuk berkelahi, baik dengan tangan maupun lidah; jangan suka bertengkar dan suka bertengkar, selalu cepat membalas dengan kata-kata jahat dan membangkitkan amarah. Persaingan demi persaingan dalam perebutan kursi jabatan tidak dengan cara kekerasan. Namun hal ini harus dilakukan

³¹ Henry's Matthew.

³² Rahmiati Tanudjaja, "Apologetika Kristen : Tanggung Jawab Semua Anak Tuhan," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2005, <https://doi.org/10.36421/veritas.v6i2.149>.

³³ Henry's Matthew, "Matthew Henry Commentary On Whole Bible."

dengan cara yang pantas dan bermartabat, bukan dengan kemarahan atau kekerasan yang merugikan. Umat Kristiani, dalam hal ini politisi, harus mengupayakan apa yang berkontribusi terhadap perdamaian dengan cara yang seirama yaitu damai. Bukan dengan cara yang kasar, gaduh dan merugikan, tetapi dengan cara yang layak dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang damai dan penuh kasih. (Rom 12:19). Oleh karena itu kerukunan hidup beragama merupakan cara interaksi antara berbagai kelompok umat beragama yang saling menghormati, menghargai, dan hidup damai, tanpa konflik. Semua masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu kerukunan yang ada.³⁴

Politisi tidak berkenan untuk bersikap balas dendam, dan ini adalah kewajiban orang Kristen pada umumnya. Memaafkan pelanggaran: itu adalah tugas orang yang berakal, dan tentu saja tugas seorang Kristen yang semangatnya telah diperbaiki dan berdasarkan pemahaman akan norma dan nilai kebenaran Alkitabiah. politisi tidak boleh dan tidak akan membalas dendam pada mereka yang telah menyinggung perasaannya, tetapi, harus mengikuti keteladanan seperti Tuhan, yang sabar dan pemaaf. Dimana pertengkaran dan pertengkaran muncul dari nafsu manusia yang berlebihan dan keinginan yang tak terkendali, yang seharusnya tidak dikejar tetapi dikekang dan dikendalikan. Orang-orang Kristen harus diingatkan tentang hal-hal ini, jangan sampai mereka menjadi marah kepada Tuhan dan menjadi sombong, dan dengan sifat dan perilaku mereka yang suka bertengkar dalam kemarahan, mencemarkan agama, menimbulkan masalah di tempat mereka berada. Seperti yang dinyatakan dalam kita Amsal bahwa Orang yang sabar lebih baik daripada pahlawan, dan orang yang mengendalikan dirinya lebih baik daripada orang yang merebut kota.³⁵

Ramah dan lemah lembut

Kata yang digunakan untuk menunjukan ramah adalah kata *epieikhv epieikes* yang memiliki arti ramah, baik-budi, lemah lembut, bersikap suka mengalah. Dan kata Lemah lembut menggunakan kata *prauthv prautes* yang keseluruhan arti menggambarkan sikap lemah-lembut, kerendahan-hatian dan kelemahlembutan. Ini bersifat nilai dari sebuah keadilan dan jujur, atau ikhlas dan jujur dalam menyikapi segala sesuatunya, tanpa mengartikan perkataan atau perbuatan dalam arti yang paling buruk. Memang demi perdamaian, politisi terkadang harus mengalah dengan mengorbankan haknya, dan tentunya sikap dan perilakunya harus baik dan lembut. Sebab perilaku tersebut adalah bagian dari menjadi garam dan terang supaya perbuatan baiknya dapat menjadi contoh bagi sesama. Penganut kekristenan dalam kajian ini adalah para politisi yang hendaknya bersikap lemah lembut, tidak hanya di dalam hati, namun juga dalam perkataan dan tindakannya sebagai aktualisasi. Selalu bersikap lemah lembut setiap saat, yang ditekankan

³⁴ Mujiono Sang Putra, "Implementasi Konsep Pluralisme Dalam Membangun Keharmonisan Hidup Beragama Di Sekolah," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2020, <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1245>.

³⁵ Henry's Matthew, "Matthew Henry Commentary On Whole Bible."

lemah lembut dalam segala keadaan dan di segala kesempatan, tidak hanya kepada sahabat, tapi juga kepada orang yang dianggap musuh, dan tentunya kepada semua orang ³⁶.

Hidup dalam ketaatan

Tidak taat menggunakan kata *apeiyhv apeithes* yang berarti tidak taat, berontak, orang-orang durhaka, durhaka. Sebab tidak taat, keras kepala dan keras penderian yang tidak beralasan, menjadi indikasi ketidaktaatan, sebab ketidak taatan adalah melawan kuasa kebenaran firman dan memberontak bahkan terhadap hukum alam dan juga memberontak kepada Allah dan semua hukum yang dituntut oleh masyarakat. Adalah baik untuk mengontraskan dua hal ini, ketidaktahuan dan ketaatan. Ketidaktaatan adalah hal betapa bodohnya melanggar dan menentang kebenaran.³⁷

Tidak Sesat

Sesat dalam kata ini menggunakan kata *planaw planaο* yang berarti menyesatkan; pasif sesat, keliru, salah jalan; mengembara dengan jalan yang salah. Sesat juga memiliki arti berkeliaran tidak stabil. Artinya, mereka menyimpang dari jalan yang benar dan suci. Orang-orang dalam keadaan bejat ini memiliki sifat sesat dan karenanya dibandingkan dengan domba yang hilang. Orang seperti itu harus dicari, dibawa kembali, dan diletakkan di jalan yang benar (Mazmur 119:176). Dia lemah dan rentan terhadap tipu muslihat setan dan lainnya yang hanya menunggu kesempatan untuk menipu dan menyesatkannya.³⁸

Tidak menjadi budak hawa nafsu

Nafsu di sini dilambangkan dengan kata *epiyumia epithumia* yang mempunyai arti nafsu, rindu, nafsu, hasrat yang membabi-buta yang selaras dengan kesenangan duniawi. Menjadi pelayan berbagai nafsu dan keinginan. Artinya, menjadi instrumen dan budak hawa nafsu dan keinginan yang salah. Mereka tidak mudah menjadi budak berbagai hawa nafsu dan keinginan jika tidak dibutakan dan dirayu oleh segala keserakahan, sehingga sebagai politisi mereka justru harus mengesampingkan ego dan kepentingan pribadinya yang berujung pada kemaksiatan. Sebab orang-orang berdosa berpikir bahwa mereka sedang bersenang-senang, sedangkan Firman menyebutnya sebagai perbudakan dan penghambaan: mereka bekerja keras dan terikat seperti budak, jauh dari kebebasan dan kebahagiaan, dan malah menjadi tawanan, hanya tunduk pada nafsu dan keinginan tuan mereka yang kejam, si jahat. Ketika para politisi menjadi budak keinginan mata, daging, atau keserakahan hidup, betapa sengsaranya manusia yang menjadi budak dosa, karena ia mempunyai banyak tuan, keinginan yang satu mendorongnya ke satu arah, keinginan yang lain ke arah yang lain. Kebanggaan memerintahkan satu hal, keserakahan yang lain, yang seringkali sebaliknya. Budak nafsu jahat seringkali berpikiran dan menganggap diri mereka

³⁶ Henry's Matthew.

³⁷ Henry's Matthew.

³⁸ Henry's Matthew.

bebas. Namun nafsu memikat mereka dengan janji-janji kebebasan, tetapi dengan memberikan diri mereka kepadanya, mereka menjadi budak perbuatan jahat yang hanya beralasan kekuasaan yang sementara.

Tidak hidup dalam kejahatan

Kejahatan menggunakan kata *kakia kakia* yang memiliki arti kejahatan, Kesusahan, kebusukan, kejahatanmu, kejahatan-kejahatan. Kejahatan ingin melukai orang lain dan bersukacita di dalamnya adalah bentuk dari sikap yang melanggar kebenaran Alkitabiah. Oleh sebab itu Politik Kristen harus tidak hidup dalam kejahatan karena dalam pandangan etis teologis Kristen, kejahatan dianggap sebagaipelanggaran dan juga dosa yang secara sadar dan memiliki nalar harus dihindari. Untuk itu Politik Kristen berani memperlihatkan kebaikan dan kasih kepada sesama manusia, serta menghindari arogansi dan kesombongan. Untuk itu dalam memperjuangkan politik, orang-orang Kristen tetap harus menjadi terang dan garam dan tentunya menjadi berkat bagi sesama di mana pun para politikus berada.

Tidak hidup dalam kedengkian dan keji serta kebencian

Kata kedengkian menggunakan kata *fyonov phthonos* yang berarti keirihatian, kecemburuan, kedengkian. Sedangkan kata keji menggunakan kata *stughtov stugnetos* berarti yang membangkitkan benci dan kebencian. Dan untuk kata membenci menggunakan kata *misew miseo* yang secara nalar berarti membenci; tidak mengacuhkan, tidak merespon karena alasan keadaan tidak suka. Hidup dalam dengki merupakan kejahatan yang secara tidak langsung membuat pribadinya menggerutu dan mengeluh atas kebaikan dan kesuksesan orang lain, atau mereka malah yang membenci kesejahteraan dan kesuksesan orang lain dalam segala hal. Inilah akar kepahitan yang menjadi sumber kejahatan: pikiran dan kata-kata jahat, kedengkian yang penuh dosa dan memutarbalikan fakta atau bersilat lidah yang dengannya kedengkian dapat merampas dan merusak pujian yang layak dan adil yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Kata-kata mereka adalah pedang yang membunuh nama baik dan kehormatan orang-orang di sekitar mereka.³⁹

Menghargai kasih Karunia

Menghargai kasih karunia diayat ke 4-6 pengorbanan Yesus sungguh nyata dan hal itu karena kemurahan Allah atas hidup manusia maka sebagai pemimpin politikus atau orang yang gterlibat dalam kekuasaan juga semestinya menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan. Dia menyelamatkan manusia bukan karena perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, tapi karena anugerah-Nya, bukan karena tindakan spesifik atau amal manusia, tapi karena anugerah dan belas kasihan-Nya saja. Pekerjaan memang harus terlihat di antara orang-orang yang diselamatkan. Maka itu politisi harus menghormati dan menjunjung tinggi anugerah Tuhan yang dengan cuma-cuma memberikan keselamatan. Karena segala sesuatu berdasarkan prinsip kebaikan dan kemurahan yang sempurna, yang

³⁹ Henry's Matthew.

tidak layak diterimanya. Pemilihan terjadi karena kasih karunia: umat pilihan Allah dipilih menjadi kudus bukan karena kemampuan manusia tetapi karena perkenanan Allah (Ef 1:4). Oleh kasih karunia orang percaya kepada Yesus dibenarkan dengan cuma-cuma (Rom 3:24) dan oleh kasih karunia kita dikuduskan dan diselamatkan: Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, itu bukan hasil usahamu sendiri, melainkan pemberian Allah (Ef 2:8). Iman dan segala anugerah keselamatan adalah anugerah dan karya Allah yang cuma-cuma.

Membumikan Sikap dan Prinsip Politikus dalam Nilai Kekristenan

Sebagai warga negara yang baik, kehidupan umat Kristiani tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, yang mana aktivitas berbangsa dan bernegara menjadi salah satu sarana penunjang pemerintahan. Sebab hak dan tanggung jawab sebagai warga negara ikut melindungi negaranya. Jika umat Kristiani mempunyai hak dan tanggung jawab, maka umat Kristiani di dalam gereja juga mempunyai peluang untuk berpolitik, tentunya karena umat Kristiani harus mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Masalahnya adalah bagaimana umat Kristiani mengambil posisi dalam situasi seperti ini.⁴⁰ Memang benar, etika politik Kristen harus dipraktikkan dengan benar sehingga umat Kristen dapat mengembangkan pemahaman terbuka tentang “yang lain manusia sesamanya”, termasuk pengembangan teologi lingkungan yang hidup dalam pertetanggaan.⁴¹ Yang penuh dengan kasih. Sedikitnya ada empat perbedaan mengenai sikap politik orang Kristen. Pertama, sikap anti politik, yang kedua, pasifis, dan yang ketiga, revolusioner-kekerasan, terus yang terakhir keempat, adalah adanya politik moral.⁴² Dari keempatnya, tidak banyak yang terlibat langsung dalam mengambil tanggung jawab untuk mengingatkan negara dan pemerintah, tentunya sesama warga negara yang berada di bawah kekuasaan atau pemerintahan Tuhan, tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan sangat adil dan tidak hanya membawa kebaikan. kepada semua orang di negara bagian, namun juga memperkuat negara itu sendiri.⁴³ Salah satu langkah yang harus diambil adalah tanggung jawab dan peran penting umat Kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan kesadaran politiknya berupa pembentukan organisasi atau partai yang berpartisipasi dalam politik.⁴⁴ Maka orang Kristen

⁴⁰ Adolf Bastian Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.

⁴¹ Paulus Eko Kristianto, “Merumuskan Etika Politik Kristen Dalam Era Gangguan Terorisme Di Indonesia,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (April 29, 2019): 223–35, <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.186>.

⁴² Yohanes Hasiholan Tampubolon, Dreitsohn Franklyn Purba, and Rinaldo A P Bettay, “Konstruksi Yesus Sebagai Anak Allah Dalam Teologi Politik,” *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 19, no. 1 (2023): 95–110.

⁴³ Dawa, “Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik.”

⁴⁴ Oey Natanael Winanto and Johnnie Manopo, “Relasi Gereja, Negara, Dan Masyarakat,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.108>.

yang terpanggil dan memiliki pengetahuan serta mendasari setiap keputusannya dengan melihat ajaran dan prinsip kemanusiaan yang diunggulkan dapat ikut dalam kanca perpolitikan, baik memilih maupun dipilih.

Tentu saja, gereja tidak boleh menjadi instrumen politik, sekaligus tidak boleh menjadi tempat umat paroki atau jemaat melakukan aktivitas politiknya di dalam gereja dan komunitasnya dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga spiritual. Baik lambang gereja maupun bendera gereja tidak boleh dikibarkan bersamaan dengan bendera gerakan politik. Gereja harus menjadi sebuah ruang sekaligus institusi yang tidak terpengaruh oleh naluri politik setiap anggotanya.⁴⁵ Namun gereja tentunya menjadi pengajar jemaat yang terlibat dalam politik praktis maupun ajang personal branding dalam menguasai panggung kekuasaan. Gereja harus mampu memberikan pemahaman dan nalar yang sesuai dengan Alkitabiah sebagai pondasi yang kuat para politikus tersebut, untuk memiliki etika politik kristen yang sepenuhnya bergantung dari mengashi Allah dan sesama dalam mengaktualisasi setiap kebijakannya. Oleh karena itu, etika Kristiani dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat juga menjadi prioritas bagi para politisi, hal ini juga terkait dengan sikap politik iman dan etis Kristiani yang berlandaskan pada prinsip-prinsip teokrasi yaitu seruan umat Kristiani untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Di mana kehidupan tersebut bertujuan untuk memberikan kedamaian dalam komunitas anak bangsa dan mewujudkan bangsa, negara, dan masyarakat yang ada dalam rencana Tuhan.⁴⁶ Maka para politikus Kristen harus melakukan segala peran dalam perpolitikan yang terbaik demi kebaikan semua tanpa mengabaikan kebenaran yang hakiki yaitu nilai Alkitabiah dan iman Kristiani.⁴⁷ Sehingga gereja dapat berperan dalam politik adalah membawa misi gereja untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dan damai sejahtera di bumi ⁴⁸. Oleh karena itu, Gereja harus membekali dan mendidik warganya dengan pendidikan politik, yaitu Gereja harus mampu menjadi wadah yang mempersiapkan warganya memasuki kancah politik praktis, dengan penekanan pada perwujudan iman yang sesuai dengan moral, etika dan moral. Dan juga adanya persyaratan rohani (Efesus 4:11-16). Dan ditegaskan bahwa konsep politik yang kotor dalam agama Kristen atau etika Kristen adalah tidak dibenarkan ada dalam gereja dan kekristenan maka hal itu merupakan pernyataan yang salah, karena dalam agama Kristen merupakan bentuk aksi kolektif bertujuan untuk membangun bangsa.⁴⁹

Gereja juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan dan sekaligus berupaya memastikan bahwa pemerintahan negara dipimpin oleh orang-orang yang mampu

⁴⁵ Dawa, "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik."

⁴⁶ Winanto and Manopo, "Relasi Gereja, Negara, Dan Masyarakat."

⁴⁷ F S Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 1–16, <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/66>.

⁴⁸ Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia."

⁴⁹ Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis."

memberikan keadilan dan kebaikan kepada semua orang⁵⁰. Tentu saja hal ini menegaskan bahwa Gereja memposisikan dirinya dalam kancah politik, yang pada praktiknya adalah soal perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan, namun harus selaras dengan nilai-nilai doktrin dan aturan hukum. Dan sikap politik seperti itu harus mendukung masyarakat yang memperjuangkan kelangsungan hidupnya sebagai bentuk hak yang sangat esensial⁵¹. Dengan signifikansi politik seperti ini, mau tidak mau gereja harus terlibat dalam politik. Apabila nilai kasih yang menjadi ciri khas Gereja benar-benar diamalkan, maka tentu tindakan kasih yang dilakukan terhadap sesama juga harus mencakup upaya dan tindakan yang menjamin agar orang lain menerima kebaikan dan keadilan yang menjadi haknya sebagai warga negara⁵². Dan gereja juga dapat mengajarkan umat beriman untuk ikut serta dalam kesejahteraan kota, bangsa, dan negara di mana umat beriman itu tinggal (Yeremia 29:7). Maka sebagai orang yang beriman dan terpenggil, kita harus taat kepada Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Umat Kristen harus membiasakan diri untuk melihat seluruh masyarakat politik dan peraturan politik berada di bawah penghakiman dan kasih karunia Tuhan. Dapat diartikan bahwa umat Kristiani ikut serta dalam politik karena aspek politiknya tetap berada dalam kekuasaan dan kasih karunia Tuhan.⁵³ Agar umat Kristiani bisa memahami bahwa politik adalah wadah yang disediakan Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan yang dijalankan hendaknya bermanfaat bagi kebaikan bersama, yang didasarkan pada keadilan dan cinta kasih terhadap sesama.⁵⁴ Dan para politisi Kristen menjadikan takut akan Tuhan sebagai dasar berpolitik dan membangun politik moral Kristen yang berdampak pada kedamaian ketika menyangkut politik praktis.⁵⁵ Kehadiran agama dan gereja tidak dapat disangkal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan perubahan sosial. Kehadiran Gereja dalam dimensi politik tidak bisa dihindari, karena politik merupakan sarana bagi Gereja dan teologi untuk mewujudkan keyakinan, teori dan ajaran yang hidup di dalamnya.⁵⁶ Sehingga ilmu pengetahuan, kebenaran dan keadilan senantiasa menjadi titik tolak dan keagungan Tuhan menjadi tujuan utama berbagai bentuk kekuasaan di dunia, didorong oleh ketaqwaan yang tinggi terhadap

⁵⁰ Dawa, "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik."

⁵¹ Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis."

⁵² Dawa, "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik."

⁵³ Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia."

⁵⁴ Yohanes Krismantyo Susanta, "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36.

⁵⁵ Kurnia Sondang Lumban Gaol, "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia," *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 35–51.

⁵⁶ Alter I Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–23, <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>.

pemenuhan tugas politik guna membantu sesama karena perasaan simpati dan empati yang dilandasi cinta sejati terhadap permasalahan sosial yang sedang bermasalah.⁵⁷

IV. Kesimpulan

Teologi Titus 3:1-7 memberikan panduan bagi politikus Kristen masa kini untuk membumikan nilai dan etika politik Kristen. Dalam pandangan etis teologis, politikus Kristen harus tunduk dan ikut pada aturan yang dilakukan pada pemerintah serta harus menghormati otoritas yang ada. Mereka juga harus berperilaku dalam moralitas dan karakter yang baik dan tidak menjadi penghalang bagi pemerintah. Maka untuk membumikan nilai dan etika politik Kristen dalam teologi titus 3:1-7 bagi politikus Kristen masa kini, diperlukan pengertian dan paradigma bahwa politikus Kristen harus mengetahui hakikat Politik dan kepentingannya. Bahkan memahami gereja dan tantangan politik. Supaya politikus yang hidup berintegritas memiliki sikap dan prinsip politikus dalam nilai dan etika politik. Tentunya politikus Kristen harus tunduk Kepada pemerintah dan Hukum, harus hidup Ketaatan dalam melakukan perbuatan baik, tidak memfitnah, tidak bertengkar dan harus hidup dalam Ketaatan. Tidak Sesat, tidak menjadi budak hawa nafsu, tidak hidup dalam kejahatan, tidak hidup dalam kedengkian dan keji serta kebencian dan tentunya dapat menghargai kasih karunia. Selain itu, politikus Kristen harus memperlihatkan kebaikan dan kasih kepada sesama manusia, serta menghindari sifat sombong atau arogan. Dalam konteks politik yang harus dilakukan para politus Kristen adalah menanamkan nilai-nilai Kristen untuk dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan politik. Oleh karena itu, politikus Kristen masa kini perlu membumikan nilai dan etika politik Kristen dalam tindakan dan keputusan mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan damai.

Referensi

- Arifianto, Yonatan Alex, and Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi. "Aktualisasi Pemimpin Gereja Menjaga Moral Dan Integritas Umat Dalam Menghadapi Tahun Politik." *Jurnal Salvation* 4, no. 1 (2023): 60–71.
- Arifianto, Yonatan Alex, and Aji Suseno. "Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen." *Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 2 (2020): 2087–7927. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias>.
- Assa, Rudy N. *Tokoh-Tokoh Kristen Yang Mewarnai Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Borong, Robert .P. *Etika Politik Kristen*. Jakarta: UPI& PSE, 2006.
- Dawa, Markus Dominggus Lere. "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 54–78.

⁵⁷ J Rungkat, "Peran Sosial-Politik Kristen Di Indonesia Melalui Pendekatan Teologi Politik Yesus (Sumbangsih Materi Bagi Deradikalisasi Agama)," *Dinamis* 2, no. 12 Des (2018): 30–40, <https://scholar.archive.org/work/bzugyenymjg75axdi56xsnajbq/access/wayback/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/22129233/KaryaIlmiahJimmyRungkat.pdf>.

- <https://doi.org/10.47596/solagratia.v3i2.40>.
- Dwi pramonojai, Gilrandi Aristya. "Politik Popularitas Menurut Etika Kristen." *Ritornera - Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia*, 2023. <https://doi.org/10.54403/rjtpi.v3i2.68>.
- Erman S. Saragih. "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis." *Didaskein* 6, no. 2 (2016): 1–11.
- Gaol, Kurnia Sondang Lumban. "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia." *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 35–51.
- Henry's Matthew. "Matthew Henry Commentary On Whole Bible," 2002. <https://www.biblestudytools.com/commentaries/matthew-henry-complete/1-peter/2.html>.
- Henry Matthew Commentary, Tafsiran Online. "Henry Matthew Commentary, Tafsiran Online.," n.d.
- James, James. "Partisipasi Orang Kristen Dalam Perpolitikan Di Indonesia." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 2, no. 2 (2016): 187–98. <https://doi.org/10.24114/antro.v2i2.5305>.
- Kristianto, Paulus Eko. "Merumuskan Etika Politik Kristen Dalam Era Gangguan Terorisme Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (April 29, 2019): 223–35. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.186>.
- Lumban Gaol, Kurnia Sondang. "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia." *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 35–51. <https://doi.org/10.52157/me.v5i1.57>.
- Manafe, F S. "Sikap Kristen Dalam Arena Politik." *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 1–16. <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/66>.
- Manafe, Ferdinan Samuel. "Sikap Kristen Dalam Arena Politik." *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.52157/me.v6i1.66>.
- Ngelow, Zakaria J. "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–22. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.
- Olla, Paulinus Yan. *Spiritualitas Politik: Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Putra, Mujiono Sang. "Implementasi Konsep Pluralisme Dalam Membangun Keharmonisan Hidup Beragama Di Sekolah." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2020. <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1245>.
- Regynaldi, Ray. "Studi Etis Terhadap Ketidaktaatan Sipil Dari Perspektif Tema 'Ketaatan' Dalam Perjanjian Baru." *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 2012.
- Rungkat, J. "Peran Sosial-Politik Kristen Di Indonesia Melalui Pendekatan Teologi Politik Yesus (Sumbangsih Materi Bagi Deradikalisasi Agama)." *Dinamis* 2, no. 12 Des (2018): 30–40. <https://scholar.archive.org/work/bzугyenyymjg75axdi56xsnajbq/access/wayback/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/22129233/KaryaIlmiahJimmyRungkat.pdf>.
- Sahardjo, Hadi P. "Orang Kristen Dan Kehidupan Politik." *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan*

- Pengembangan Pelayanan*) 3, no. 2 (2021): 217–27. <https://doi.org/10.51828/td.v3i2.96>.
- Sandi, Jhon Retei Alfri. “Perilaku Politik Gereja Kristen Evangelis (GKE) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kalimantan Tengah Tahun 2019.” *Jurnal Politik Profetik* 8, no. 1 (2020): 37–61.
- Santosa, Nur Budi. “Penokohan Daniel Sebagai Figur Politisi Kristen Di Indonesia.” *Jurnal Antusias* 3, no. 6 (2014): 73–81.
- Sianipar, H D, and P Eunike. “Perspektif Etika Politik Kristen Tentang Hubungan Gereja Dan Negara.” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 1, no. 1 (2020): 33–46. <https://jurnal.widyaagape.ac.id/index.php/jrsc/article/view/38>.
- Simamora, Adolf Bastian. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.
- Sirait, Saut Hamonangan. *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36.
- Tambunan, Aripin. “Peran Orang Kristen Dalam Politik Dan Kepemimpinan Negara.” *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 3, no. 2 (2014): 165–81.
- Tampubolon, Yohanes Hasiholan, Dreitsohn Franklyn Purba, and Rinaldo A P Bettay. “Konstruksi Yesus Sebagai Anak Allah Dalam Teologi Politik.” *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 19, no. 1 (2023): 95–110.
- Tanudjaja, Rahmiati. “Apologetika Kristen : Tanggung Jawab Semua Anak Tuhan.” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2005. <https://doi.org/10.36421/veritas.v6i2.149>.
- Umрати, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Winanto, Oey Natanael, and Johnnie Manopo. “Relasi Gereja, Negara, Dan Masyarakat.” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.108>.
- Wowor, Alter I. “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern.” *BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–23. <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>.
- Yewangoe, Andreas A. *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa*. Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009.
- Zebua, Kasieli, and Mario Gani. “Ketaatan Kepada Pemerintah Dalam Perspektif Perjanjian Baru.” *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 2023. <https://doi.org/10.56191/shalom.v3i1.71>.
- Zuhro, R Siti. “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.” *Jurnal Penelitian Politik*, 2019. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.